



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pengelolaan keuangan Kabupaten Purbalingga tahun 2014 secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik. Salah satu indikatornya adalah realisasi APBD Kabupaten Purbalingga tahun 2014 yang cukup tinggi, yaitu realisasi pendapatan sebesar Rp1.345.621.795.678,00 (102,11%) dan realisasi belanja sebesar Rp1.271.839.631.902,00 (90,02%).

REALISASI PENDAPATAN

Realisasi pendapatan tahun 2014 sebesar Rp1.345.621.795.678,00 atau mencapai 102,11% dari target pendapatan daerah dalam APBD-P tahun 2014 sebesar Rp1.317.827.239.000,00. Realisasi pendapatan daerah yang melebihi target tersebut didorong oleh realisasi PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang melebihi target sedangkan realisasi Pendapatan Transfer sedikit di bawah target yang telah ditetapkan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2014

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PAD	169.855.790.000,00	202.593.689.614,00	119,27
Pendapatan Transfer	1.142.601.389.000,00	1.136.928.031.787,00	99,50
Lain-lain PD yang Sah	5.370.060.000,00	6.100.074.277,00	113,59
Jumlah	1.317.827.239.000,00	1.345.621.795.678,00	102,11

Realisasi PAD Kabupaten Purbalingga tahun 2014 sebesar Rp202.593.689.614,00 atau mencapai **119,27%** dari target. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.136.928.031.787,00 atau mencapai **99,50%** dari target, dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai Rp6.100.074.277,00 atau mencapai **113,59%** dari target.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang dimiliki sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah di tahun 2014 sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah.

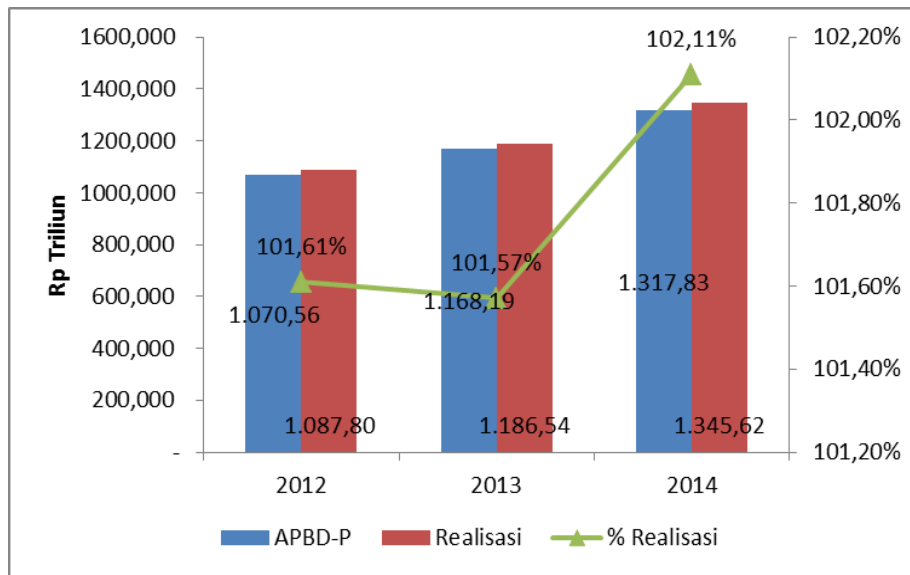


PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

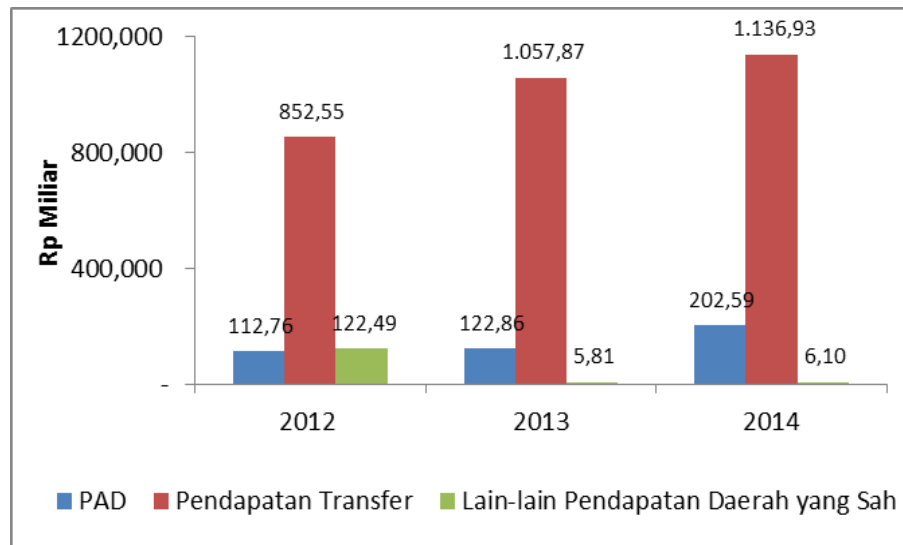
Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2012-2014



Sumber: DPPKAD Kab. Purbalingga, diolah

Realisasi pendapatan daerah tahun 2014 di atas mengalami kenaikan sebesar Rp159.089.297.881,00 atau naik **13,41%** dibandingkan realisasi pendapatan daerah tahun 2013. Kenaikan tersebut lebih tinggi dari kenaikan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 9,08%. Peningkatan tersebut tercapai karena semua jenis pendapatan daerah mengalami peningkatan di tahun 2014 baik PAD, Pendapatan Transfer maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah.

Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Berdasarkan Sumber
Tahun 2012-2014



Sumber: DPPKAD Kab. Purbalingga, diolah

Realisasi PAD mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar **64,90%** dari semula Rp122.858.738.938,00 di tahun 2013 menjadi Rp202.593.689.614,00 di tahun 2014. Demikian juga dengan realisasi Pendapatan Transfer, mengalami kenaikan sebesar **7,47%** dari semula Rp1.057.868.610.291,00 di tahun 2013 menjadi Rp1.136.928.031.787,00 di tahun 2014. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meningkat **5,08%** dari semula Rp5.805.148.568,00 di tahun 2013 menjadi Rp6.100.074.277,00 di tahun 2014.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

Realisasi pendapatan daerah di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana eksternal, terlihat dari tingginya rasio Transfer + Lain-Lain Pendapatan Daerah terhadap total Pendapatan Daerah yang mencapai 84,94%, atau dengan kata lain, operasional pemerintah daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah masih sangat tergantung kepada dana dari pihak eksternal.

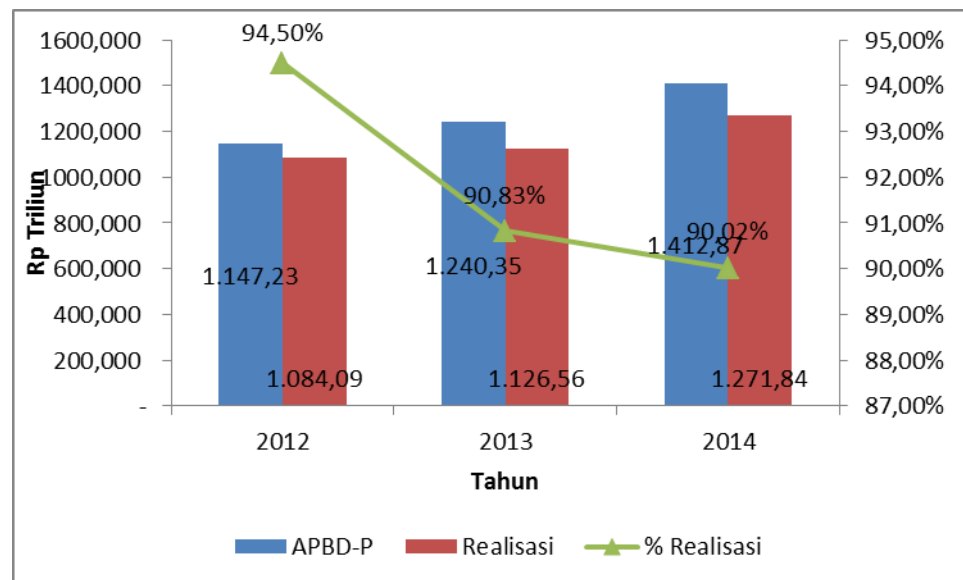
REALISASI BELANJA

Realisasi belanja daerah tahun 2014 sebesar **Rp1.271.839.631.902,00** atau mencapai **90,02%** dari rencana belanja daerah dalam APBD-P tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan operasional maupun pembangunan di lingkungan Kabupaten Purbalingga berjalan dengan cukup baik. Selain itu, tidak terealisasinya pos Belanja Tidak Terduga juga menjadi salah satu indikator bahwa tidak terdapat hal-hal luar biasa di tahun 2014 yang membutuhkan pendanaan khusus di luar alokasi anggaran yang sudah ditetapkan.

Tabel Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2014

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Operasi	1.196.244.916.000,00	1.108.659.494.106,00	92,68
Belanja Modal	160.643.990.000,00	112.249.667.286,00	69,87
Belanja Tidak Terduga	1.902.203.000,00	-	-
Transfer	54.081.299.000,00	50.930.470.510,00	94,17
Jumlah	1.412.872.408.000,00	1.271.839.631.902,00	90,02

Seperti halnya realisasi Pendapatan Daerah yang terus menunjukkan peningkatan, realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga juga terus mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2013, realisasi belanja daerah tahun 2014 secara agregat mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu Rp145.282.599.201,00 atau naik **12,90%** sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah.



Jika dilihat dari sisi komposisi Belanja Daerah, sebagian besar pendapatan daerah masih digunakan untuk membiayai operasi Pemerintah Daerah, yaitu kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek seperti belanja pegawai,

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

belanja barang dan jasa, dan lain-lain yang tercermin dari besarnya realisasi Belanja Operasi tahun 2014 yang mencapai 87,17% dari total Belanja Daerah tahun 2014 sebagaimana tabel di bawah.

Tabel Perkembangan Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2012-2014

	2012	2013	2014
Belanja Operasi	906.293.990.652,00	962.877.329.580,00	1.108.659.494.106,00
Belanja Modal	126.673.450.871,00	112.767.369.781,00	112.249.667.286,00
Belanja Tidak Terduga	1.463.133.760,00	76.383.250,00	-
Transfer	49.656.491.840,00	50.835.950.090,00	50.930.470.510,00
Total	1.084.087.067.123,00	1.126.557.032.701,00	1.271.839.631.902,00

Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja)

Berdasarkan jenis, realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.108.659.494.106,00 (92,68%), Belanja Modal sebesar Rp112.249.667.286,00 (10,01%), dan Transfer sebesar Rp50.930.470.510,00 (94,17%) sedangkan Belanja Tidak Terduga tidak ada realisasi.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, peningkatan terbesar Belanja Daerah tahun 2014 terjadi pada Belanja Operasi yaitu naik sebesar Rp145.782.164.526,00 atau naik 15,14% sedangkan Belanja Modal sedikit menurun sebesar Rp517.702.495,00 atau turun 0,46% sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

	2014		2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	1.196.244.916.000,00	1.108.659.494.106,00	962.877.329.580,00
Belanja Modal	160.643.990.000,00	112.249.667.286,00	112.767.369.781,00
Belanja Tidak Terduga	1.902.203.000,00	-	76.383.250,00
Transfer	54.081.299.000,00	50.930.470.510,00	50.835.950.090,00
Jumlah	1.412.872.408.000,00	1.271.839.631.902,00	1.126.557.032.701,00

Belanja Pemerintah Daerah Menurut Organisasi/Satuan Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki realisasi belanja terbesar adalah Dinas Pendidikan yang mencapai Rp242.955.585.267,00 atau 19,10% dari total Belanja Daerah. Daftar 10 SKPD yang memiliki Belanja Terbesar Tahun 2014 adalah sebagai berikut.

	Anggaran	Realisasi		Kontribusi
		Rp	%	
Dinas Pendidikan	277.321.038.000,00	242.955.585.267,00	87,61	19,10
Dinas Pekerjaan Umum	224.628.629.000,00	193.885.833.928,00	86,31	15,24
DPPKAD	101.543.742.000,00	88.391.097.657,00	87,05	6,95
RSUD Goeteng Taroenadibrata	85.789.578.000,00	77.049.869.103,00	89,81	6,06
Sekretariat Daerah	40.678.592.000,00	34.832.990.291,00	85,63	2,74
UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mrebet	20.295.594.000,00	18.495.354.215,00	91,13	1,45
Dinas Kesehatan	19.333.800.000,00	18.146.499.394,00	93,86	1,43
Sekretariat DPRD	18.156.031.000,00	17.529.120.834,00	96,55	1,38
UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bukateja	19.195.412.000,00	17.514.838.559,00	91,24	1,38
UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga	17.744.732.000,00	16.173.094.484,00	91,14	1,27
Jumlah Belanja 10 Besar SKPD	824.687.148.000,00	724.974.283.732,00	87,91	57,00
Total Belanja Daerah	1.412.872.408.000,00	1.271.839.631.902,00	90,02	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa total belanja 10 besar SKPD memberikan kontribusi 57,00% dari total Belanja Daerah tahun 2014 yang berasal dari 171 SKPD.

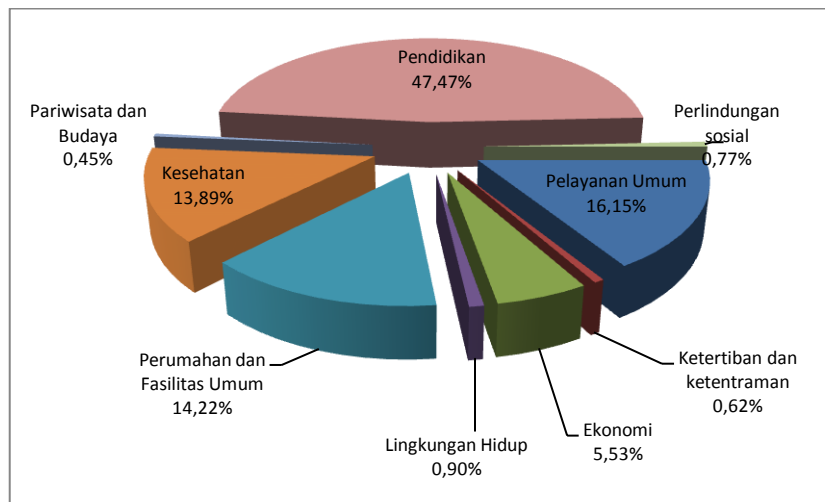
Belanja Pemerintah Daerah Menurut Fungsi

Sesuai dengan PSAP No. 2 Akuntansi Belanja, belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Realisasi Belanja Daerah tahun 2014 menurut fungsi Pemerintahan dapat dilihat dari tabel berikut.

Fungsi	2014		2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pelayanan Umum	227.708.400.000,00	205.395.334.671,00	191.672.294.056,00
Ketertiban dan ketentraman	7.919.486.000,00	7.876.804.281,00	6.198.206.902,00
Ekonomi	76.098.164.000,00	70.320.664.555,00	67.019.837.613,00
Lingkungan Hidup	15.622.427.000,00	11.420.119.528,00	4.690.144.476,00
Perumahan dan Fasilitas Umum	202.964.761.000,00	180.874.040.955,00	170.123.831.373,00
Kesehatan	195.180.340.000,00	176.597.856.543,00	143.350.323.445,00
Pariwisata dan Budaya	6.041.934.000,00	5.761.071.870,00	4.602.060.554,00
Pendidikan	670.662.153.000,00	603.805.372.245,00	528.145.745.346,00
Perlindungan social	10.674.743.000,00	9.788.367.254,00	10.754.588.936,00
Jumlah	1.412.872.408.000,00	1.271.839.631.902,00	1.126.557.032.701,00

Realisasi belanja Fungsi Pendidikan masih menjadi yang terbesar yaitu Rp603.805.372.245,00 atau 47,47% dari total Belanja Daerah tahun 2014. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp75.659.626.899,00 atau 14,33% jika dibandingkan realisasi tahun 2013.

Komposisi Belanja Daerah tahun 2014 berdasarkan fungsi dapat dilihat dari grafik di bawah.



Grafik. Komposisi Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi Tahun 2014

Belanja Pemerintah Daerah Menurut Urusan Pemerintahan

Sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2007, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri dari 2 jenis yaitu Urusan Wajib yang meliputi 26 Urusan Pemerintahan dan Urusan Pilihan yang terdiri dari 8 Urusan Pemerintahan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

Urusan Wajib, yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota karena berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan wajib terdiri dari 26 urusan pemerintah, yaitu:

No	Urusan	No	Urusan
1	Pendidikan;	14	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2	Kesehatan;	15	Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
3	Lingkungan hidup;	16	Perhubungan;
4	Pekerjaan umum;	17	Komunikasi dan informatika;
5	Penataan ruang;	18	Pertanahan;
6	Perencanaan pembangunan;	19	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
7	Perumahan;	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegaw aian, dan persandian;
8	Kepemudaan dan olahraga;	21	Pemberdayaan masyarakat dan desa;
9	Penanaman modal;	22	Sosial;
10	Koperasi dan usaha kecil dan menengah;	23	Kebudayaan;
11	Kependudukan dan catatan sipil;	24	Statistik;
12	Ketenagakerjaan;	25	Kearsipan; dan
13	Ketahanan pangan;	26	Perpustakaan.

Urusan Pilihan, yaitu urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Urusan pilihan terdiri dari 8 urusan, yaitu:

No	Urusan
1	Kelautan dan perikanan;
2	Pertanian;
3	Kehutanan;
4	Energi dan sumber daya mineral;
5	Pariwisata;
6	Industri;
7	Perdagangan; dan
8	Ketransmigrasian.

Realisasi Belanja Urusan Wajib tahun 2014 sebesar Rp1.226.290.270.661,00 atau 89,86% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2014 sedangkan realisasi Belanja Urusan Pilihan sebesar Rp45.549.361.241,00 atau 94,51% sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

	2014		2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Urusan Wajib	1.364.676.078.000,00	1.226.290.270.661,00	1.080.946.367.447,00
Urusan Pilihan	48.196.330.000,00	45.549.361.241,00	45.610.665.254,00
Jumlah	1.412.872.408.000,00	1.271.839.631.902,00	1.126.557.032.701,00

Jika dibandingkan dengan tahun 2013, realisasi Belanja Urusan Wajib mengalami kenaikan sebesar Rp145.343.903.214,00 atau naik 13,45% sedangkan realisasi Belanja Urusan Pilihan mengalami penurunan sebesar Rp61.304.013,00 atau turun 0,13% dari realisasi tahun 2013.

Rincian realisasi belanja Kabupaten Purbalingga berdasarkan urusan tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel di bawah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

Tabel Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Urusan
Tahun 2014

Kode	Urusan	Anggaran	Realisasi	%
1	URUSAN WAJIB	1.364.676.078.000,00	1.226.290.270.661,00	89,86
1.01	Pendidikan	663.851.121.000,00	601.121.494.879,00	90,55
1.02	Kesehatan	186.785.634.000,00	168.254.277.454,00	90,08
1.03	Pekerjaan Umum	202.439.180.000,00	180.463.235.405,00	89,14
1.04	Perumahan	525.581.000,00	410.805.550,00	78,16
1.05	Penataan Ruang	883.424.000,00	746.537.800,00	84,51
1.06	Perencanaan Pembangunan	5.806.506.000,00	5.286.253.380,00	91,04
1.07	Perhubungan	10.539.671.000,00	7.895.273.114,00	74,91
1.08	Lingkungan Hidup	4.518.697.000,00	4.473.512.035,00	99,00
1.09	Pertanahan	10.220.306.000,00	6.200.069.693,00	60,66
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	3.836.473.000,00	3.649.360.011,00	95,12
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	693.350.000,00	679.995.100,00	98,07
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	8.394.706.000,00	8.343.579.089,00	99,39
1.13	Sosial	6.144.920.000,00	5.459.012.143,00	88,84
1.14	Ketenagakerjaan	4.357.253.000,00	4.235.395.254,00	97,20
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.434.452.000,00	7.179.739.424,00	96,57
1.16	Penanaman Modal	2.070.579.000,00	1.934.609.561,00	93,43
1.17	Kebudayaan	1.871.929.000,00	1.769.741.000,00	94,54
1.18	Pemuda dan Olah Raga	4.792.367.000,00	702.845.500,00	14,67
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	7.919.486.000,00	7.876.804.281,00	99,46
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD	219.320.478.000,00	197.631.799.005,00	90,11
1.21	Ketahanan Pangan	1.801.400.000,00	1.792.651.179,00	99,51
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.868.484.000,00	5.724.965.652,00	97,55
1.23	Statistik	727.423.000,00	710.879.630,00	97,73
1.24	Kearsipan	329.550.000,00	325.038.150,00	98,63
1.25	Komunikasi dan Informatika	1.524.443.000,00	1.441.364.506,00	94,55
1.26	Perpustakaan	2.018.665.000,00	1.981.031.866,00	98,14
2	URUSAN PILIHAN	48.196.330.000,00	45.549.361.241,00	94,51
2.01	Pertanian	27.251.977.000,00	27.007.001.663,00	99,10
2.02	Kehutanan	1.413.748.000,00	1.374.383.000,00	97,22
2.03	Energi dan Sumberdaya Mineral	3.050.386.000,00	2.563.826.850,00	84,05
2.04	Pariwisata	4.170.005.000,00	3.991.330.870,00	95,72
2.05	Kelautan dan Perikanan	3.063.554.000,00	3.036.268.700,00	99,11
2.06	Perdagangan	8.008.190.000,00	6.373.685.408,00	79,59
2.07	Perindustrian	1.132.891.000,00	1.116.358.250,00	98,54
2.08	Ketransmigrasian	105.579.000,00	86.506.500,00	81,94
	Jumlah	1.412.872.408.000,00	1.271.839.631.902,00	90,02

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum, realisasi belanja untuk masing-masing urusan sudah menunjukkan pencapaian yang cukup baik, hanya terdapat 10 urusan yang realisasi belanjanya di bawah rata-rata belanja daerah (< 90,02%), yaitu:

Kode	Urusan	Anggaran	Realisasi	%
1.18	Pemuda dan Olah Raga	4.792.367.000,00	702.845.500,00	14,67
1.09	Pertanahan	10.220.306.000,00	6.200.069.693,00	60,66
1.07	Perhubungan	10.539.671.000,00	7.895.273.114,00	74,91
1.04	Perumahan	525.581.000,00	410.805.550,00	78,16
2.06	Perdagangan	8.008.190.000,00	6.373.685.408,00	79,59
2.08	Ketransmigrasian	105.579.000,00	86.506.500,00	81,94
2.03	Energi dan Sumberdaya Mineral	3.050.386.000,00	2.563.826.850,00	84,05
1.05	Penataan Ruang	883.424.000,00	746.537.800,00	84,51
1.13	Sosial	6.144.920.000,00	5.459.012.143,00	88,84
1.03	Pekerjaan Umum	202.439.180.000,00	180.463.235.405,00	89,14



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

Beberapa hal yang menyebabkan relatif rendahnya realisasi anggaran pada beberapa urusan di atas antara lain:

- Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum hanya terealisasi 53,96% dari anggaran sebesar Rp7.526.277.000,00.
- Beberapa kegiatan yang terkait dengan pengadaan tanah juga menjadi tidak terlaksana karena proses pengadaan tanahnya tidak terealisasi, di antaranya Pembangunan Jembatan Kali Gintung Dukuh Limus Desa Karangbawang dan Pembangunan Pasar Bukateja.
- Terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya cukup besar dan mengalami gagal lelang seperti Pembangunan Jembatan Gatot Subroto Desa Karangtengah Kecamatan Kertanegara Ruas Jalan Karanganyar-Karangmoncol.
- Perencanaan yang belum optimal pada beberapa kegiatan sehingga waktu pelelangan maupun pelaksanaan kegiatan tidak cukup seperti Pembangunan Lampu Stadion Goentoer Darjono.

Belanja Pemerintah Daerah Menurut Kelompok Belanja

Sesuai dengan BULTEK Nomor 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, berdasarkan kelompoknya, Belanja Pemerintah Daerah dibagi menjadi 2 yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Pengklasifikasian belanja ini berdasarkan kriteria apakah suatu belanja mempunyai kaitan langsung dengan program/kegiatan atau tidak. Belanja yang berkaitan langsung dengan program/kegiatan (misalnya belanja honorarium, belanja barang, belanja modal) diklasifikasikan sebagai Belanja Langsung sedangkan sedangkan belanja yang tidak secara langsung dengan program/kegiatan (misalnya gaji dan tunjangan pegawai bulanan, belanja bunga, donasi, belanja bantuan keuangan, belanja hibah, dan sebagainya) diklasifikasikan sebagai Belanja Tidak Langsung.

Realisasi Belanja Langsung tahun 2014 mencapai Rp444.646.090.058,00 atau 84,44% sedangkan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp827.193.541.844,00 atau 93,33% dari anggaran sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

	2014		2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	886.293.496.000,00	827.193.541.844,00	706.646.863.288,00
Belanja Pegawai	767.190.798.000,00	722.485.060.979,00	629.339.101.027,00
Belanja Bunga	24.688.000,00	17.095.745,00	24.686.921,00
Belanja Subsidi	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
Belanja Hibah	51.674.758.000,00	44.328.185.710,00	16.624.492.000,00
Belanja Bantuan Sosial	10.119.750.000,00	8.132.728.900,00	8.446.250.000,00
Belanja Bagi Hasil	17.500.000,00	13.821.310,00	12.982.090,00
Belanja Bantuan Keuangan	54.963.799.000,00	51.816.649.200,00	51.722.968.000,00
Belanja Tidak Terduga	1.902.203.000,00	-	76.383.250,00
BELANJA LANGSUNG	526.578.912.000,00	444.646.090.058,00	419.910.169.413,00
Belanja Pegawai	39.834.123.000,00	37.523.660.906,00	30.529.591.550,00
Belanja Barang dan Jasa	326.100.799.000,00	294.872.761.866,00	276.613.208.082,00
Belanja Modal	160.643.990.000,00	112.249.667.286,00	112.767.369.781,00
Jumlah	1.412.872.408.000,00	1.271.839.631.902,00	1.126.557.032.701,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

Jika dibandingkan realisasi tahun 2013, realisasi Belanja Langsung mengalami kenaikan sebesar Rp24.735.920.645,00 atau naik 5,89%, sedangkan realisasi Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan sebesar Rp120.546.678.556,00 atau naik 17,06%.

Dari angka realisasi di atas, maka rasio perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Purbalingga tahun 2014 adalah 34,96% berbanding 65,04%. Hal ini menunjukkan bahwa 2/3 dari total Belanja Daerah masih teralokasikan untuk belanja yang tidak terkait langsung dengan output suatu program/kegiatan.